



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBA ANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.064.443.069.935,00 bertambah/berkurang sebesar Rp. 32.738.322.165,06 sehingga menjadi Rp. 1.097.181.392.100,06, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

1. Semula	Rp. 1.036.843.069.935,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.689.155.252,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan	Rp. 1.023.153.914.683,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 1.064.443.069.935,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 32.738.322.165,06
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan	Rp. 1.097.181.392.100,06

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp. 28.600.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 49.025.748.528,17
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 77.625.748.528,17
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.598.271.111,11
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.598.271.111,11
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 74.027.477.417,06
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00



Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1. Semula Rp. 69.535.239.033,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.556.910.716,00)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 67.978.328.317,00
- b. Pendapatan transfer
 - 1. Semula Rp. 932.064.831.002,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (12.797.397.566,00)
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 919.267.433.436,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 35.242.999.900,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 665.153.030,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 35.908.152.930,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
 - 1. Semula Rp. 11.953.787.464,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 665.123.596,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 12.618.911.060,00
- b. Retribusi daerah;
 - 1. Semula Rp. 5.882.330.230,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.646.668.383,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.235.661.847,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan ;
 - 1. Semula Rp. 4.757.968.413,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.165.185.423,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah perubahan Rp. 5.923.153.836,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1. Semula Rp. 46.941.152.926,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.740.551.352,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 45.200.601.574,00



(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp. 858.522.085.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.422.397.566,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 845.099.687.434,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp. 73.542.746.002,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 625.000.000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp. 74.167.746.002,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 0,00

b. Dana darurat

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp. 35.242.999.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 665.153.030,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 35.908.152.930,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1. Semula	Rp. 740.715.111.187,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.832.798.675,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 765.547.909.862,00

b. Belanja modal;

1. Semula	Rp. 139.010.757.118,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.473.527.649,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 145.484.284.767,00



c. Belanja tidak terduga;	
1. Semula	Rp. 3.171.248.230,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 833.162.341,06
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 4.004.410.571,06
d. Belanja transfer;	
1. Semula	Rp. 181.545.953.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 598.833.500,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 182.144.786.900,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 434.859.973.448,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (4.451.877.534,00)
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp. 430.408.095.914,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 276.166.226.367,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 31.423.595.754,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 307.503.522.121,00
c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp. 25.831.121.372,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.388.919.545,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 23.442.201.827,00
f. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp. 3.857.790.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 250.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 4.107.790.000,00



(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula	Rp. 1.274.795.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.295.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 1.269.500.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula	Rp. 26.731.453.047,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.389.832.663,00)
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 25.341.620.384,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1. Semula	Rp. 36.998.900.240,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.028.002.840,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 35.970.897.400,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. Semula	Rp. 67.430.497.249,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 11.331.670.331,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 78.762.167.580,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. Semula	Rp. 6.575.111.582,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.435.012.179,00)
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 4.140.099.403,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp. 0,00

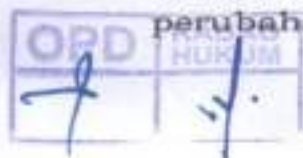
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 3.171.248.230,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 833.162.341,06
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 4.004.410.571,06

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp. 1.797.366.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 448.833.500,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 2.246.199.900,00



b. Belanja bantuan keuangan

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.179.748.587.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 150.000.000,00 |

Jumlah belanja bantuan keuangan

Setelah perubahan Rp. 179.898.587.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.28.600.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 49.025.748.528,17 |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 77.625.748.528,17

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 2.598.271.111,11 |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 3.598.271.111,11

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.28.600.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 29.025.748.528,17 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 57.625.748.528,17

b. Pencairan dana cadangan

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |

Jumlah pencairan dana cadangan

Setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 20.000.000.000,00 |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

Rp. 20.000.000.000,00



- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | |
|---|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|---|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 0,00 |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | |
|--|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 1.000.000.000,00 |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan | Rp. 2.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 1.598.271.111,11 |
| 3. Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. 1.598.271.111,11 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 0,00 |



Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;



8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH I	
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH II	
4	BPPD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

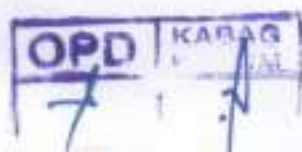
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/1215/LB/2021

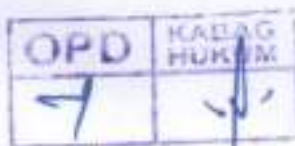
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	Rp.1.036.843.069.935,00	Rp.1.023.153.914.683,00	(13.689.155.252,00)	(1,32)%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.69.535.239.033,00	Rp.67.978.328.317,00	(1.556.910.716,00)	(2,23)%
4.1.01.	Pajak Daerah	Rp.11.953.787.464,00	Rp.12.618.911.060,00	665.123.596,00	5,56%
4.1.02.	Retribusi Daerah	Rp.5.882.330.230,00	Rp.4.235.661.847,00	(1.646.668.383,00)	(27,99)%
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.4.757.968.413,00	Rp.5.923.153.836,00	1.165.185.423,00	24,48%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.46.941.152.926,00	Rp.45.200.601.574,00	(1.740.551.352,00)	(3,70)%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	Rp.932.064.831.002,00	Rp.919.267.433.436,00	(12.797.397.566,00)	(1,37)%
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.858.522.085.000,00	Rp.845.099.687.434,00	(13.422.397.566,00)	(1,56)%
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.73.542.746.002,00	Rp.74.167.746.002,00	625.000.000,00	0,84%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp.35.242.999.900,00	Rp.35.908.152.930,00	665.153.030,00	1,88%
4.3.01.	Pendapatan Hibah	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
4.3.02.	Dana Darurat	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.35.242.999.900,00	Rp.35.908.152.930,00	665.153.030,00	1,88%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp.1.036.843.069.935,00	Rp.1.023.153.914.683,00	(13.689.155.252,00)	(1,32)%
5.	BELANJA DAERAH	Rp.1.064.443.069.935,00	Rp.1.097.181.392.100,06	32.738.322.165,06	3,07%
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.740.715.111.187,00	Rp.765.547.909.862,00	24.832.798.675,00	3,35%
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp.434.859.973.448,00	Rp.430.408.095.914,00	(4.451.877.534,00)	(1,02)%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.276.166.226.367,00	Rp.307.589.822.121,00	31.423.595.754,00	11,37%
5.1.03.	Belanja Bunga	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
5.1.04.	Belanja Subsidi	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
5.1.05.	Belanja Hibah	Rp.25.831.121.372,00	Rp.23.442.201.827,00	(2.388.919.545,00)	(9,24)%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.3.857.790.000,00	Rp.4.107.790.000,00	250.000.000,00	6,48%
5.2.	BELANJA MODAL	Rp.139.010.757.116,00	Rp.145.484.284.767,00	6.473.527.649,00	4,65%
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	Rp.1.274.795.000,00	Rp.1.269.500.000,00	(5.295.000,00)	(0,41)%



5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.26.731.453.047,00	Rp.25.341.620.384,00	(1.389.832.663,00)	(5,19)%
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.36.998.900.240,00	Rp.35.970.897.400,00	(1.028.002.840,00)	(2,77)%
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.87.430.497.249,00	Rp.78.762.167.580,00	11.331.670.331,00	16,80%
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.6.575.111.582,00	Rp.4.140.099.403,00	(2.435.012.179,00)	(37,03)%
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp.3.171.248.230,00	Rp.4.004.410.571,06	833.162.341,06	26,27%
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	Rp.3.171.248.230,00	Rp.4.004.410.571,06	833.162.341,06	26,27%
5.4.	BELANJA TRANSFER	Rp.181.545.953.400,00	Rp.182.144.786.900,00	598.833.500,00	0,32%
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	Rp.1.797.366.400,00	Rp.2.246.199.900,00	448.833.500,00	24,97%
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.179.748.587.000,00	Rp.179.898.587.000,00	150.000.000,00	0,08%
	JUMLAH BELANJA	Rp.1.064.443.069.935,00	Rp.1.097.181.392.100,06	32.738.322.165,06	3,07%
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.(27.600.000.000,00)	Rp.(74.027.477.417,06)	(46.427.477.417,06)	168,21%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp.28.600.000.000,00	Rp.77.625.748.528,17	49.025.748.528,17	171,41%
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.28.600.000.000,00	Rp.57.625.748.528,17	29.025.748.528,17	101,48%
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.0,00	Rp.20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00%
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
6.1.99.	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp.28.600.000.000,00	Rp.77.625.748.528,17	49.025.748.528,17	171,41%
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp.1.000.000.000,00	Rp.3.598.271.111,11	2.598.271.111,11	259,82%
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	Rp.1.000.000.000,00	Rp.2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.0,00	Rp.1.598.271.111,11	1.598.271.111,11	0,00%
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.0,00	Rp.0,00	0,00	0,00%



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian Pemerintah	Pendapatan				Belanja										Berantah							
		Setelah Perubahan		Berubah		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berubah							
		Rp	Rp	Rp	%	Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah	
						Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.234.270.000,00	42.215.528.438,39	13.877.794.900,00	(8,86)	498.099.278.375,00	137.827.793.000,00	0,00	0,00	876.916.813.375,00	482.792.324.342,34	0,00	0,00	0,00	815.899.264.895,34	35.133.363.812,29	8,86						
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENGADAAN	200.400.000,00	211.450.000,00	5.000.000,00	2,45	227.478.347.000,00	36.346.887.242,00	0,00	0,00	263.825.234.242,00	382.388.888.888,89	0,00	0,00	0,00	270.412.847.732,24	7.846.812.794,24	5,86						
1.1.2.02.0-0	Dana Pembiayaan dan Hibah	411.800.000,00	432.500.000,00	10.100.000,00	2,45	514.838.898.342,00	79.483.374.483,00	0,00	0,00	594.322.272.825,00	624.177.738.878,89	0,00	0,00	0,00	598.412.847.732,24	2.846.812.794,24	3,86						
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPENDIDIKAN	45.897.270.000,00	41.877.000.438,39	13.882.214.000,00	(8,86)	138.588.278.375,00	18.828.316.483,00	0,00	0,00	157.416.594.858,39	158.384.374.175,00	0,00	0,00	0,00	165.897.445.915,00	18.885.852.822,00	12,86						
1.2.02.0-0	Dana Pembiayaan	31.897.270.000,00	27.867.500.438,39	18.834.728.000,00	(22,22)	138.588.278.375,00	8.482.028.813,00	0,00	0,00	147.070.307.388,39	147.869.337.175,00	0,00	0,00	0,00	155.897.445.915,00	17.885.852.822,00	12,26						
1.2.02.0-0	Dana Pembiayaan Lain	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	87.386.800,00	0,12	47.832.348.175,00	13.276.542.800,00	0,00	0,00	61.108.890.975,00	61.145.880.975,00	0,00	0,00	0,00	61.108.890.975,00	3.717.448.850,00	11,26						



Kode	Uraian Pembiayaan	Pendapatan				Belanja										Berkurang		Berkurang
		Setelah Perubahan	Rp	3	%	Sebelum Perubahan					Selanjutnya Perubahan							
						Berkurang		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	
						Rp	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PERSAMAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	488.421.775,00	72.448.825,00	0,00	0,00	860.867.290,00	72.448.825,00	102.581.125,00	0,00	0,00	402.828.250,00	118.288.000,00	27,7%	
2.14.2.20.2.11	Dana Transfer ke Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00	878.812.800,00	144.811.850,00	0,00	0,00	800.807.250,00	144.811.850,00	888.187.450,00	0,00	0,00	405.027.250,00	118.288.000,00	27,7%	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS EKSTRAKUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.744.800,00	0,00	0,00	0,00	2.190.744.800,00	0,00	2.057.194.000,00	0,00	0,00	2.057.194.000,00	107.550.800,00	0,9%	
2.1.2.2.2.2	Dana Transfer ke Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.482.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	2.170.744.800,00	30.200.000,00	5.319.272.000,00	0,00	0,00	4.887.786.800,00	107.550.800,00	12,8%	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PENGALIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.700.422,00	882.442.582,00	0,00	0,00	4.058.195.804,00	1.868.807.875,00	3.241.888.404,00	0,00	0,00	4.281.982.802,00	301.307.070,00	7,5%	
2.23.2.24.2.4	Dana Transfer ke Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171.488.800,00	1.268.800.100,00	0,00	0,00	4.058.195.804,00	2.170.744.800,00	5.319.272.000,00	0,00	0,00	4.281.982.802,00	301.307.070,00	7,5%	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PENGALIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	98.887.000,00	0,00	0,00	0,00	71.502.000,00	2.805.800,00	21.930.800,00	0,00	0,00	34.141.000,00	147.200.000,00	88,2%	
2.23.2.24.2.4	Dana Transfer ke Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00	107.794.800,00	5.210.800,00	0,00	0,00	71.502.000,00	2.805.800,00	42.370.800,00	0,00	0,00	34.141.000,00	147.200.000,00	88,2%	
3	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PENGALIHAN	98.887.000,00	92.200.800,00	1.338.000,00	1,40	28.503.504.000,00	4.889.811.100,00	0,00	0,00	31.813.405.100,00	3.281.742.000,00	34.120.388.100,00	0,00	0,00	37.224.186.100,00	3.403.503.000,00	10,3%	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PENGALIHAN	98.887.000,00	94.796.800,00	1.550.000,00	1,62	5.422.000.000,00	888.807.300,00	0,00	0,00	8.900.405.000,00	3.582.807.000,00	8.884.012.000,00	0,00	0,00	8.900.405.000,00	541.403.000,00	6,1%	
3.25.0.0.0	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PENGALIHAN	98.887.000,00	100.000.000,00	2.700.000,00	2,82	10.505.116.790,00	1.171.884.000,00	0,00	0,00	8.900.405.000,00	1.171.884.000,00	11.507.004.000,00	0,00	0,00	8.900.405.000,00	541.403.000,00	6,1%	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKAS PENGALIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.482.100,00	270.100.000,00	0,00	0,00	2.147.100.000,00	387.212.000,00	2.114.818.000,00	0,00	0,00	2.803.827.750,00	308.718.000,00	11,1%	
3.13.2.2.2.2	Dana Transfer ke Instansi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000.000,00	847.410.000,00	0,00	0,00	2.137.188.000,00	774.625.000,00	5.033.130.000,00	0,00	0,00	2.803.827.750,00	308.718.000,00	11,1%	

Kode	Uraian Pemeliharaan Daerah	Pendapatan			Belanja										Bertambah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berkurang	
		Rp	Rp	%	Operasi	Modal	Tidak Tersedia	Transfer	Jumlah	Operasi	Modal	Tidak Tersedia	Transfer	Jumlah	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.27	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	11.488.875.000,00	3.178.844.800,00	0,00	0,00	30.834.895.800,00	1.902.407.500,00	23.317.180.413,00	0,00	0,00	35.379.857.513,00	3.178.844.800,00	18,15
1.27.3.3.3.3.3	PEKERJAAN	0,00	0,00	0,00	15.342.287.000,00	8.187.460.000,00	0,00	0,00	11.889.800.000,00	1.415.175.000,00	27.267.142.000,00	0,00	0,00	16.628.438.413,00	1.388.386.413,00	12,09
1.27.3.3.3.3.3.1	Daftar Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	14.275.733.000,00	152.580.000,00	0,00	0,00	1.564.268.000,00	285.000.000,00	18.211.186.000,00	0,00	0,00	9.741.148.498,00	1.176.341.544,00	20,75
1.27.3.3.3.3.3.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.088.122.100,00	248.841.800,00	0,00	0,00	1.336.963.900,00	348.841.800,00	1.485.127.800,00	0,00	0,00	1.699.878.500,00	381.036.700,00	28,68
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1	PEKERJAAN	0,00	0,00	0,00	2.178.244.200,00	447.882.200,00	0,00	0,00	1.338.862.700,00	497.882.200,00	2.482.274.800,00	0,00	0,00	1.889.879.500,00	381.036.700,00	20,18
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	934.300.000,00	708.313.000,00	0,00	0,00	1.642.613.000,00	815.113.000,00	381.200.000,00	0,00	0,00	1.891.814.000,00	80.800.000,00	3,12
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1	Daftar Pemeliharaan, Daftar Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	1.888.700.000,00	1.412.000.000,00	0,00	0,00	1.642.613.000,00	1.332.888.800,00	1.782.721.200,00	0,00	0,00	1.891.214.000,00	80.800.000,00	3,12
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	188.808.330.810,00	828.854.000,00	0,00	0,00	108.748.284.810,00	678.985.000,00	152.488.548.300,00	0,00	0,00	102.548.213.300,00	8.483.171.477,00	7,80
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	87.233.800.000,00	280.854.000,00	0,00	0,00	48.124.733.800,00	638.985.000,00	98.988.108.233,00	0,00	0,00	28.388.879.238,00	25.505.103.642,00	11,50
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	1.050.807.700.000,00	1.181.750.000,00	0,00	0,00	98.124.753.800,00	1.337.138.000,00	117.978.218.875,00	0,00	0,00	98.548.879.238,00	8.508.783.842,00	11,50
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	471.275.830.000,00	244.850.000,00	0,00	0,00	41.823.638.000,00	248.000.000,00	41.548.241.000,00	0,00	0,00	43.756.243.000,00	2.132.812.250,00	5,12
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	82.733.201.800,00	698.300.000,00	0,00	0,00	41.823.638.000,00	498.000.000,00	87.018.186.110,00	0,00	0,00	43.756.243.000,00	2.132.812.250,00	5,12
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	48.115.321.242,00	881.180.000,00	0,00	0,00	271.483.914.472,00	737.487.730,00	48.987.733.730,00	0,00	0,00	271.483.914.472,00	1.483.294.240,00	0,00
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	7.297.845.300,00	95.141.000,00	0,00	0,00	3.388.888.300,00	91.388.730,00	4.791.291.633,00	0,00	0,00	8.782.316.579,00	888.576.342,00	10,10
1.27.3.3.3.3.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	14.888.881.840,00	138.482.800,00	0,00	0,00	7.388.888.800,00	132.617.500,00	13.482.433.000,00	0,00	0,00	8.782.316.579,00	888.576.342,00	10,10

PENERBITAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUTAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Daftar Pemusatan : 1. 01 LEMBAGA PEMERINTAHAN KABUPATEN BARAT
Organisasi : 1. 01. 02 Dinas Perhubungan dan Kependudukan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Berubah(Berurang)		Dasar Hukum
		Secara Perubahan	Sesuai Perubahan	(Rp)	%	
				5-6-7	6-7-3	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1-01.3-22.0-00.02 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	206.400.000,00	211.450.000,00	(0.000.000,00)	(2,43)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.400.000,00	211.450.000,00	(0.000.000,00)	(2,43)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 00 0.00 00 4 1 2	Penerimaan Daerah	206.400.000,00	211.450.000,00	(0.000.000,00)	(2,43)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	296.820.034.938,00	299.472.843.732,34	(2.666.613.794,34)	(0,90)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01	PROGRAM PEMULAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	210.469.309.938,00	211.458.328.600,34	(1.177.889.304,34)	(0,56)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01	KABUPATENKOTA	190.506.938,00	197.381.599,00	(6.874.661,00)	(3,61)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.01	Kegiatan Pemencatan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.506.938,00	197.381.599,00	(6.874.661,00)	(3,61)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.01 01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Pemencatan Perangkat Daerah	190.506.938,00	197.381.599,00	(6.874.661,00)	(3,61)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.01 01 5	BELANJA OPERASI	190.506.938,00	197.381.599,00	(6.874.661,00)	(3,61)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.01 01 5 1	Sub Kegiatan: Biaya Perjalanan Dinas	190.506.938,00	197.381.599,00	(6.874.661,00)	(3,61)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.01 01 5 1 2	Sub Kegiatan: Biaya Perjalanan Dinas	190.506.938,00	197.381.599,00	(6.874.661,00)	(3,61)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	206.402.002.200,00	210.772.037.504,34	(4.370.035.304,34)	(2,12)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 01	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	206.402.002.200,00	210.772.037.504,34	(4.370.035.304,34)	(2,12)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 01 5	BELANJA OPERASI	206.402.002.200,00	210.772.037.504,34	(4.370.035.304,34)	(2,12)	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 01 5 1	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	1.572.930,00	1.572.930,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 04	BELANJA OPERASI	1.572.930,00	1.572.930,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 04 5	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	1.572.930,00	1.572.930,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 05	SKPD	2.849.930,00	2.849.930,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 05 5	BELANJA OPERASI	2.849.930,00	2.849.930,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 05 5 1	Sub Kegiatan: Biaya Perjalanan Dinas	2.849.930,00	2.849.930,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 07	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.359.593,00	1.359.593,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 07 5	BELANJA OPERASI	1.359.593,00	1.359.593,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 07 5 1	Sub Kegiatan: Biaya Perjalanan Dinas	1.359.593,00	1.359.593,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 08	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	2.249.390,00	2.249.390,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 08 5	BELANJA OPERASI	2.249.390,00	2.249.390,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.02 08 5 1	Sub Kegiatan: Biaya Perjalanan Dinas	2.249.390,00	2.249.390,00	0,00	0,00	
1 01 1-01.3-22.0-00.02 01 2.05	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Burekrasi dan Tenaga Fungsional	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

[illegible]

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	KELOMPOK 1
2	KELOMPOK 2
3	KELOMPOK 3
4	KELOMPOK 4
5	KELOMPOK 5
6	KELOMPOK 6
7	KELOMPOK 7
8	KELOMPOK 8
9	KELOMPOK 9
10	KABAG. HUKUM



RUPATI LAMPUNG BARAT

Propositiu 18

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BERSERTA HASIL
DAN SUB KEGIATAN BERSERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Berkurang/ Bertambah	
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Bertambah (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	406.006.230.275,00	123.803.798.506,30	0,00	0,00	529.809.028.781,00	482.702.344.582,24	132.367.050.663,00	0,00	0,00	615.069.394.635,24	39.150.394.854,24	6,08
1													
1	PENDIDIKAN	287.479.547.696,00	38.246.887.242,30	0,00	0,00	325.726.034.938,00	282.386.869.025,24	37.003.177.607,00	0,00	0,00	299.412.647.732,24	2.648.612.794,24	12,83
1	Disusi Pendidikan dan	287.479.547.696,00	38.246.887.242,30	0,00	0,00	325.726.034.938,00	282.386.869.025,24	37.003.177.607,00	0,00	0,00	299.412.647.732,24	2.648.612.794,24	12,83
1	Kelembagaan												



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berkurang/ Bertambah	
		Kelompok Belanja					Kelompok Belanja					Bertambah	
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Presidensi Umum	184.993.823.029,00	4.227.310.841,00	184.717.201.630,00	0,00	373.998.441.630,00	178.045.944.696,76	4.416.170.847,20	182.149.197.471,26	0,00	369.671.321.614,82	5.327.118.815,10	11,42
2	URUSAN PEMERINTAHAN	7.705.842.810,00	603.788.448,00	0,00	0,00	8.410.631.378,00	7.594.810.178,00	985.840.752,00	0,00	0,00	8.250.650.928,00	1765.840.448,00	17,87
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
3	URUSAN PEMERINTAHAN	227.506.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	285.506.000,00	88.449.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	143.449.000,00	1142.106.000,00	49,77
	BIDANG STATISTIK												
4	URUSAN PEMERINTAHAN	408.421.725,00	72.445.525,00	0,00	0,00	540.867.250,00	332.503.725,00	72.445.525,00	0,00	0,00	440.329.250,00	1155.658.000,00	87,76
	BIDANG PERSANDIAAN												
5	URUSAN PEMERINTAHAN	68.887.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	71.542.000,00	21.338.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	24.143.000,00	647.289.000,00	98,23
	BIDANG KEARSIPAN												
6	SEKRETARIAT DAERAH	67.503.898.960,00	590.804.000,00	0,00	0,00	68.124.703.860,00	58.878.425.338,00	620.524.000,00	0,00	0,00	59.508.929.338,00	18.326.783.842,00	112,50



1	7	4	2	SEKRETARIAT DAERAH	41.575.600.000,00	346.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.523.620.820,00	43.508.240.000,00	346.000.000,00	0,00	0,00	43.756.243.000,00	2.132.612.225,00	5,12
1	6	5	1	PERENCANAAN	7.297.240.300,00	62.141.000,00	0,00	0,00	0,00	7.235.048.800,00	6.701.201.428,00	61.304.150,00	0,00	0,00	6.762.510.878,00	393.578.342,00	16,49
1	9	5	2	KEUANGAN	30.118.815.000,00	480.670.000,00	184.717.207.500,00	0,00	0,00	275.234.667.500,00	30.478.004.471,00	645.048.000,00	184.149.107.471,00	0,00	277.271.140.342,00	1.078.473.352,00	0,92
1	10	5	3	KEPEGAWAIAN	5.079.078.165,00	34.239.000,00	0,00	0,00	0,00	5.179.317.162,00	5.069.077.361,00	68.990.000,00	0,00	0,00	5.437.977.361,00	487.600.750,00	9,09
1	11	5	5	PERELAKSIAN DAN PENCERAMAKAN	3.434.747.800,00	38.095.000,00	0,00	0,00	0,00	3.642.842.800,00	3.199.079.579,00	22.000.000,00	0,00	0,00	3.222.079.579,00	440.300.221,00	112,02
1	12	6	1	INSPEKTORAT DAERAH	7.171.842.504,00	96.893.000,00	0,00	0,00	0,00	7.268.775.504,00	8.172.341.309,75	92.893.000,00	0,00	0,00	8.265.234.606,75	1.000.486.401,75	13,76
1	13	7	1	KECAMATAN	14.226.306.248,00	1.896.579.670,00	0,00	0,00	0,00	16.002.886.218,00	13.465.419.698,00	1.873.072.620,00	0,00	0,00	15.278.292.278,00	373.468.900,00	15,05
2	14			Kecamatan dan Kecamatan	22.006.440.000,00	270.779.000,00	0,00	0,00	0,00	22.277.219.500,00	24.152.479.112,00	242.802.500,00	0,00	0,00	24.439.157.612,00	2.157.938.107,00	9,69
2	15	1	5	URUSAN PEMERINTAHAN	17.976.886.489,00	157.348.000,00	0,00	0,00	0,00	18.138.779.489,00	19.396.004.380,00	101.452.000,00	0,00	0,00	19.498.046.280,00	1.281.310.793,00	7,21
				BIDANG KETERANGAN DAN KETERTIDAK LAMUN SERTA PERENCANAAN MASYARAKAT													
2	16	8	1	MESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.627.503.506,00	112.890.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.464.000,00	4.720.880.852,00	141.220.500,00	0,00	0,00	4.867.111.352,00	796.627.348,00	16,24
3	17			ENHANS	48.174.695.400,00	5.352.219.000,00	0,00	0,00	0,00	51.506.913.400,00	50.056.723.721,00	3.507.312.000,00	0,00	0,00	54.054.035.721,00	2.547.122.391,00	4,95
3	18	2	7	URUSAN PEMERINTAHAN	486.998.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.996.900,00	480.996.900,00	0,00	0,00	0,00	480.996.900,00	0,00	0,00
				BIDANG TEKNOLOGI													
3	19	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN	6.734.496.800,00	70.673.675,00	0,00	0,00	0,00	6.805.179.275,00	9.048.029.212,00	779.673.875,00	0,00	0,00	5.817.299.887,00	3987.601.388,00	114,507
				BIDANG PEMERINTAHAN													
3	20	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN	4.534.663.270,00	481.156.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016.779.500,00	4.208.328.361,00	481.678.880,00	0,00	0,00	4.706.007.441,00	3206.712.500,00	95,50
				BIDANG PERENCANAAN													
3	21	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN	4.375.318.700,00	53.562.000,00	0,00	0,00	0,00	4.428.880.700,00	4.046.796.220,00	27.230.000,00	0,00	0,00	4.073.526.220,00	1365.654.486,00	19,00
				BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH													
3	22	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN	5.163.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.809.000,00	4.682.215.885,00	0,00	0,00	0,00	4.682.215.885,00	1481.813.125,00	19,33
				BIDANG PERENCANAAN MENCAL													
3	23	2	25	URUSAN PEMERINTAHAN	3.423.206.380,00	240.827.000,00	0,00	0,00	0,00	3.664.035.380,00	5.964.012.000,00	565.327.000,00	0,00	0,00	6.549.320.000,00	541.453.000,00	8,01
				BIDANG MELAKUKAN DAN PERENCANAAN													



24	3	37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN	17.409.015.460,00	2.175.044.500,00	0,00	0,00	20.524.020.960,00	23.247.100.413,00	1.002.407.500,00	0,00	0,00	24.279.507.913,00	3.345.507.943,00	18,35
25	3	38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEROKONOMIAN	1.008.122.100,00	248.941.600,00	0,00	0,00	1.250.063.700,00	1.450.137.300,00	244.941.600,00	0,00	0,00	1.699.079.500,00	961.015.806,00	26,96
26	3	39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKULIASTHAN	804.295.000,00	706.313.000,00	0,00	0,00	1.440.708.000,00	881.360.600,00	810.153.400,00	0,00	0,00	1.691.514.000,00	50.806.000,00	3,10
27			Pembangunan Lapangan Hsarp	44.294.732.841,00	73.892.328.642,00	0,00	0,00	120.207.065.484,00	40.509.010.025,00	86.003.295.594,00	0,00	0,00	132.649.948.791,00	12.302.901.205,00	10,26
28	1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKULIASTHAN DAN PEMATAAN RUMAH	30.073.413.206,00	73.201.171.049,00	0,00	0,00	104.274.585.255,00	32.500.856.627,00	84.492.095.730,00	0,00	0,00	116.873.546.357,00	12.678.961.192,00	12,17
29	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN	733.816.500,00	1.251.005.000,00	0,00	0,00	1.984.821.500,00	644.201.500,00	1.070.509.000,00	0,00	0,00	1.314.706.500,00	0,00	0,00
30	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.787.500.040,00	1.520.149.694,00	0,00	0,00	14.107.646.739,00	13.563.949.706,00	407.704.174,00	0,00	0,00	14.061.713.882,00	145.044.807,00	0,33
31			Pemertan dan Fasilitas Umum	3.143.996.500,00	0,00	0,00	0,00	3.143.996.500,00	3.143.996.500,00	0,00	0,00	3.143.996.500,00	0,00	0,00	0,00
32	1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	3.143.996.500,00	0,00	0,00	0,00	3.143.996.500,00	3.143.996.500,00	0,00	0,00	3.143.996.500,00	0,00	0,00	0,00
33			Kecamatan	141.214.440.708,00	12.009.033.405,00	0,00	0,00	153.212.474.103,00	160.087.143.170,00	11.789.005.838,00	0,00	0,00	171.896.229.015,00	18.273.754.825,00	11,50
34	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESERIHATAN	136.586.276.688,00	80.838.319.405,00	0,00	0,00	147.424.592.893,00	155.324.878.175,00	10.527.388.839,00	0,00	0,00	165.851.445.015,00	18.408.802.202,00	12,50
35	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKONOMIAN PENGOLAH DAN KELUARGA BERENCANA	4.026.164.000,00	1.201.717.000,00	0,00	0,00	6.187.861.500,00	4.779.047.000,00	1.201.717.000,00	0,00	0,00	6.034.764.000,00	1153.087.500,00	0,47
36			Pelayanan	4.024.207.100,00	288.703.000,00	0,00	0,00	4.302.912.100,00	5.174.401.224,00	387.512.500,00	0,00	0,00	5.561.713.724,00	608.001.624,00	12,20
37	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.740.744.000,00	18.009.000,00	0,00	0,00	2.758.744.000,00	2.837.784.000,00	0,00	0,00	2.837.784.000,00	197.958.000,00	0,34	
38	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.823.403.100,00	271.705.000,00	0,00	0,00	2.197.168.100,00	2.518.815.224,00	387.312.500,00	0,00	0,00	2.903.827.724,00	704.799.624,00	12,17

LAMPURAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
REKAPITULASI BELAJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
----	-----------------------------	----------	---	---	-----------------------------------

SPM Bidang Pendidikan

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.586.998,00	107.381.998,00	(83.205.000,00)
---	------------------------------------	--	----------------	----------------	-----------------

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	209.501.022.200,00	210.781.076.504,24	1.280.054.304,24
--	--	---	--------------------	--------------------	------------------

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
--	--	--	---------------	---------------	------

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.195.398,00	98.195.398,00	0,00
--	--	---------------------------------------	---------------	---------------	------

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.800.000,00	336.800.000,00	0,00
--	--	---	----------------	----------------	------

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.785.000,00	319.785.000,00	(25.000.000,00)
--	--	---	----------------	----------------	-----------------

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.551.371.400,00	56.202.920.518,00	651.549.118,00
--	--	---	-------------------	-------------------	----------------

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.641.328.500,00	24.275.285.442,00	633.956.942,00
--	--	--	-------------------	-------------------	----------------

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.835.654.367,00	4.865.567.697,00	29.913.330,00
--	--	---	------------------	------------------	---------------

		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.166.291.075,00	2.166.291.075,00	0,00
--	--	--	------------------	------------------	------

		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	159.344.100,00	159.344.100,00
--	--	--	------	----------------	----------------

		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
--	--	---	----------------	----------------	------

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			296.826.034.938,00	299.472.647.732,24	2.646.612.794,24
---	--	--	--------------------	--------------------	------------------

SPM Bidang Kesehatan

1	Dinas Kesehatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.138.000,00	59.810.400,00	(19.327.600,00)
---	-----------------	--	---------------	---------------	-----------------

		Peningkatan Pelayanan BLUD Perangkat Daerah	146.246.000,00	76.238.000,00	(70.008.000,00)
--	--	--	----------------	---------------	-----------------

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.864.495.500,00	43.529.461.523,00	5.664.966.023,00
--	--	---	-------------------	-------------------	------------------

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.649.000,00	51.649.000,00	(27.000.000,00)
--	--	--	---------------	---------------	-----------------

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.410.300,00	338.410.300,00	0,00
--	--	---------------------------------------	----------------	----------------	------

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.101.080,00	268.101.080,00	0,00
--	--	---	----------------	----------------	------

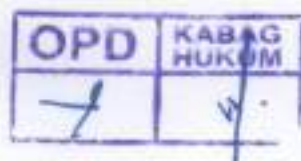
No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.740.000,00	456.040.000,00	(17.700.000,00)
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.011.198.077,00	5.266.513.970,00	255.315.893,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.698.465.278,00	45.795.300.461,00	5.096.835.183,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	42.082.600,00	42.082.600,00	0,00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.440.730.100,00	10.537.631.847,00	5.096.901.747,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.140.000,00	198.836.000,00	(23.304.000,00)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	111.539.000,00	111.539.000,00	0,00
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	57.545.000,00	57.545.000,00	0,00
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.102.241.600,00	2.459.517.699,00	(2.642.723.901,00)
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	938.401.658,00	309.449.700,00	(628.951.958,00)
2	RSUD Alimuddin Umar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.011.000,00	7.011.000,00	0,00
		Peningkatan Pelayanan BLUD	27.963.114.200,00	28.738.115.340,00	775.001.140,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.849.464.300,00	13.279.682.095,00	(3.569.782.205,00)



No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.560.000,00	24.560.000,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.800.000,00	241.450.000,00	174.650.000,00
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.398.750.000,00	9.079.730.000,00	3.680.980.000,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	241.770.000,00	415.520.000,00	173.750.000,00
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0,00	4.507.250.000,00	4.507.250.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			147.424.592.693,00	165.851.445.015,00	18.426.852.322,00
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.770.100,00	42.770.100,00	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.856.542.700,00	4.813.554.597,00	(42.988.103,00)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.966.000,00	167.902.000,00	(15.064.000,00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.634.750,00	315.634.750,00	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.113.778.400,00	1.076.049.400,00	(37.729.000,00)
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	40.886.988.691,00	55.553.667.919,00	14.666.679.228,00
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	156.198.000,00	156.198.000,00	0,00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	317.548.000,00	317.548.000,00	0,00
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.223.817.700,00	3.618.085.610,00	(605.732.090,00)
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.723.109.600,00	11.541.031.430,00	(182.078.170,00)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.706.800.000,00	6.856.800.000,00	150.000.000,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.778.000.000,00	2.778.000.000,00	0,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	855.801.250,00	936.802.500,00	81.001.250,00
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.411.183.054,00	14.087.883.891,00	676.700.837,00
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.949.495.000,00	10.733.566.160,00	(1.215.928.840,00)
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.664.952.000,00	3.869.052.000,00	(795.900.000,00)
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			104.194.585.245,00	116.873.546.357,00	12.678.961.112,00
SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	148.948.500,00	148.948.500,00	0,00
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.995.050.000,00	2.995.050.000,00	0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman			3.143.998.500,00	3.143.998.500,00	0,00
SPM Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
1	Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.750.000,00	31.067.900,00	(24.682.100,00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.152.944.099,00	8.389.734.864,00	236.790.765,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.480.000,00	0,00	(46.480.000,00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.436.000,00	83.682.000,00	(25.754.000,00)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.714.600,00	159.714.600,00	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.111.000,00	222.161.000,00	17.050.000,00
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.526.414.200,00	2.285.399.000,00	(241.015.200,00)
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	336.426.000,00	479.071.300,00	142.645.300,00
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	48.709.000,00	13.351.000,00	(35.358.000,00)
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.024.264.100,00	1.975.673.600,00	(48.590.500,00)
		Investigasi Kejadian Kebakaran	44.205.000,00	9.325.700,00	(34.879.300,00)
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	56.189.900,00	0,00	(56.189.900,00)
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	37.594.000,00	37.504.000,00	(90.000,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.330.000,00	16.330.000,00	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.077.518.300,00	2.307.892.660,00	230.374.360,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.993.500,00	76.983.500,00	(47.010.000,00)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.122.800,00	157.122.800,00	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.697.500,00	197.447.500,00	(66.250.000,00)
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	177.000.000,00	145.050.000,00	(31.950.000,00)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	952.177.900,00	938.323.936,00	(13.853.964,00)
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	409.071.000,00	1.843.973.300,00	1.434.902.300,00
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	108.386.600,00	80.037.600,00	(28.349.000,00)
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum			18.136.735.499,00	19.498.046.260,00	1.361.310.761,00
SPM Bidang Sosial					
1	Dinas Sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.602.100,00	13.907.100,00	7.305.000,00



No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Alokasi Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.350.337.900,00	2.520.117.295,00	169.779.395,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.838.600,00	195.468.600,00	(25.370.000,00)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.465.100,00	146.465.100,00	0,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.847.500,00	164.847.500,00	0,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.151.200,00	277.151.200,00	0,00
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	253.955.000,00	253.955.000,00	0,00
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	477.345.500,00	366.245.500,00	(111.100.000,00)
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	5.605.252.096,00	5.277.425.546,00	(327.826.550,00)
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	365.470.100,00	365.470.100,00	0,00
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	120.162.000,00	444.002.000,00	323.840.000,00
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.646.000,00	24.646.000,00	0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			10.193.073.096,00	10.229.700.941,00	36.627.845,00

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	Spes	
5	Spes	
6	Spes	
7	Spes	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Halaman 6/6

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	RPJMD (Rp)	APBD		Bertambah/(Berkurang)	
			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Jumlah (Rp)	%
			4	5	6-5-4	7-6-4
1	2	3				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	729.344.647.779,02	579.919.019.971,00	615.069.384.805,24	35.150.364.834,24	6,06
1	PENDIDIKAN	287.950.290.115,00	296.826.034.938,00	299.472.647.732,24	2.646.612.794,24	0,89
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.912.029.600,00	210.486.389.595,00	211.698.238.900,24	1.171.849.304,24	0,56
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85.353.460.015,00	86.194.645.342,00	87.510.064.732,00	1.315.419.390,00	1,53
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	84.600.500,00	145.000.000,00	304.344.100,00	159.344.100,00	109,69
1	KESEHATAN	242.285.010.058,00	147.424.592.693,00	165.851.445.015,00	18.426.852.322,00	12,50
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.811.507.946,00	84.159.729.380,00	87.070.528.738,00	2.910.799.358,00	3,46
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	138.049.593.912,00	51.392.285.955,00	60.598.147.031,00	9.206.881.076,00	17,91
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	11.925.793.200,00	5.662.870.100,00	15.243.717.847,00	9.580.847.747,00	169,19
1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	59.948.900,00	169.084.000,00	169.084.000,00	0,00	0,00
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	438.166.100,00	6.040.643.298,00	2.768.967.399,00	(3.271.675.899,00)	(54,16)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.796.786.497,64	104.194.585.245,00	116.873.546.357,00	12.678.961.112,00	12,17
1		12.389.414.418,64	6.520.891.950,00	6.424.910.847,00	(95.781.103,00)	(1,47)

1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.409.726.800,00	15.946.927.300,00	15.159.117.040,00	(787.810.260,00)	(4,94)
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.150.000.000,00	6.706.800.000,00	6.856.800.000,00	150.000.000,00	2,24
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.269.820.000,00	2.778.000.000,00	2.778.000.000,00	0,00	0,00
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.850.000.000,00	855.801.250,00	936.802.500,00	81.001.250,00	9,46
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMUKAN	27.745.399.498,00	13.411.183.054,00	14.087.683.891,00	676.700.837,00	5,05
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.182.220.000,00	11.949.495.000,00	10.733.566.160,00	(1.215.928.840,00)	(10,18)
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	19.206.517.898,00	4.664.952.000,00	3.869.052.000,00	(795.900.000,00)	(17,06)
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49.030.628.383,00	40.886.988.891,00	55.553.667.919,00	14.666.679.228,00	35,87
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	158.788.000,00	158.198.000,00	156.198.000,00	0,00	0,00
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.271.500,00	317.548.000,00	317.548.000,00	0,00	0,00
1	4		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN	4.733.732.700,00	3.143.998.500,00	3.143.998.500,00	0,00	0,00
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMUKAN	4.586.201.700,00	148.948.500,00	148.948.500,00	0,00	0,00
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN SERTA PERUMUKAN KUMUH	147.531.000,00	2.995.050.000,00	2.995.050.000,00	0,00	0,00
1	5		KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.868.807.589,00	18.136.735.499,00	19.498.046.260,00	1.361.310.761,00	7,51
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.154.058.569,00	11.416.297.799,00	11.690.336.824,00	274.039.025,00	2,40
1	5	2	PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.485.519.300,00	2.911.549.200,00	2.777.821.300,00	(133.727.900,00)	(4,59)
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.178.184.620,00	1.646.635.500,00	3.007.384.896,00	1.360.749.336,00	82,84
1	5	4	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	2.051.045.100,00	2.162.253.000,00	2.022.503.300,00	(139.749.700,00)	(6,46)
1	6		SOSIAL	710.020.819,38	10.193.073.096,00	10.229.700.941,00	36.627.845,00	0,36
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.810,38	3.166.242.400,00	3.317.956.795,00	151.714.395,00	4,79
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	54.309,00	253.955.000,00	253.955.000,00	0,00	0,00
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	6.082.597.590,00	5.643.671.046,00	(438.926.550,00)	(7,22)
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	609.959.700,00	365.470.100,00	365.470.100,00	0,00	0,00
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	300.162.000,00	624.002.000,00	323.840.000,00	107,89
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99.996.000,00	24.646.000,00	24.646.000,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	116.374.376.865,00	83.961.197.824,00	80.162.798.109,00	(3.796.399.715,00)	(4,52)

2	7	TENAGA KERJA	2.551.614.700,00	460.996.900,00	460.996.900,00	0,00	0,00
2	7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.335.168.300,00	331.567.900,00	331.567.900,00	0,00	0,00
2	7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	109.953.900,00	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00	0,00
2	7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	106.492.500,00	52.869.000,00	52.869.000,00	0,00	0,00
2	8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.966.701.770,00	5.169.983.950,00	4.608.819.107,00	(561.144.843,00)	(10,85)
2	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.758.373.770,00	3.910.382.850,00	3.593.706.207,00	(316.676.643,00)	(8,10)
2	8	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	38.984.000,00	234.984.000,00	234.984.000,00	0,00	0,00
2	8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	51.843.000,00	51.843.000,00	51.843.000,00	0,00	0,00
2	8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	432.067.900,00	808.827.800,00	428.462.100,00	(180.365.700,00)	(29,63)
2	8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	43.420.000,00	43.420.000,00	43.420.000,00	0,00	0,00
2	8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	586.013.200,00	265.506.300,00	212.403.800,00	(53.102.500,00)	(20,00)
2	8	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	55.000.000,00	55.000.000,00	44.000.000,00	(11.000.000,00)	(20,00)
2	9	PANGAN	2.400.000.000,00	4.782.130.500,00	4.833.642.812,00	51.512.312,00	1,08
2	9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	2.734.974.300,00	2.647.240.212,00	(87.734.088,00)	(3,21)
2	9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI LINTUK KEDALUTAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	750.000.000,00	656.522.500,00	656.522.500,00	0,00	0,00
2	9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	900.000.000,00	1.207.767.700,00	1.347.014.100,00	139.246.400,00	11,53
2	9	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	350.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2	9	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	400.000.000,00	122.866.000,00	122.866.000,00	0,00	0,00
2	10	PERTANAHAN	3.986.808.000,00	1.984.821.500,00	1.714.706.500,00	(270.115.000,00)	(13,61)
2	10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	97.825.000,00	97.825.000,00	97.825.000,00	0,00	0,00
2	10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.326.114.000,00	1.326.114.000,00	1.145.614.000,00	(180.500.000,00)	(13,61)
2	10	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.836.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	726.755.000,00	560.882.500,00	471.267.500,00	(89.615.000,00)	(15,98)
2	11	LINGKUNGAN HIDUP	21.483.108.553,00	14.107.656.739,00	14.061.713.982,00	(45.944.857,00)	(0,33)

2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.072.288.244,00	6.729.390.706,00	7.123.294.268,00	393.903.562,00	5,85
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.365.000.000,00	0,00	46.965.900,00	46.965.900,00	0,00
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.494.000.000,00	348.712.075,00	347.062.526,00	(1.649.549,00)	(0,47)
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.625.396.234,00	3.090.282.866,00	3.083.521.096,00	(6.781.770,00)	(0,22)
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.084.600,00	36.744.600,00	36.744.600,00	0,00	0,00
2	11	6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	63.859.000,00	64.080.900,00	64.080.900,00	0,00	0,00
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	117.466.500,00	87.081.500,00	33.180.500,00	(53.892.000,00)	(61,89)
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	132.451.805,00	84.027.835,00	63.776.835,00	(20.251.000,00)	(24,10)
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.372.583.170,00	3.867.338.257,00	3.263.078.257,00	(404.260.000,00)	(11,02)
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.305.288.472,00	5.931.556.480,00	5.693.489.687,00	(238.066.793,00)	(4,01)
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.261.485.380,00	4.747.536.387,00	1.486.051.007,00	45,56
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.240.439.272,00	1.814.877.200,00	718.115.700,00	(1.096.761.500,00)	(80,43)
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	452.000.000,00	272.992.000,00	105.094.000,00	(166.898.000,00)	(61,14)
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	550.355.200,00	526.734.900,00	74.977.600,00	(451.757.300,00)	(85,77)
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	63.474.000,00	55.487.000,00	45.766.000,00	(8.701.000,00)	(15,69)
2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.488.994.684,00	6.805.170.275,00	5.817.368.887,00	(987.601.388,00)	(14,52)
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.563.589.784,00	3.372.838.875,00	3.060.404.987,00	(292.233.888,00)	(8,06)
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	412.672.500,00	876.000.000,00	846.910.000,00	(28.090.000,00)	(3,21)
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.345.755.100,00	1.503.430.100,00	1.045.952.700,00	(457.477.400,00)	(30,43)
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.165.977.300,00	1.054.101.300,00	844.101.200,00	(210.000.100,00)	(19,92)
2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.276.296.000,00	6.187.681.500,00	6.034.784.000,00	(153.097.500,00)	(2,47)

2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	103.729.500,00	84.037.500,00	73.347.500,00	(10.690.000,00)	(12,72)
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	872.804.500,00	5.761.360.000,00	5.633.307.500,00	(128.052.500,00)	(2,22)
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	289.762.000,00	342.484.000,00	328.129.000,00	(14.355.000,00)	(4,19)
2	15		PERHUBUNGAN	8.550.530.818,00	5.026.719.550,00	4.700.007.441,00	(326.712.109,00)	(6,50)
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.498.794.300,00	3.463.285.700,00	3.256.534.791,00	(204.750.909,00)	(5,91)
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.051.736.518,00	1.563.433.850,00	1.441.472.650,00	(121.961.200,00)	(7,80)
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.974.926.408,00	8.416.631.376,00	8.250.650.928,00	(165.980.448,00)	(1,97)
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.015.467.800,00	2.965.953.770,00	3.018.242.346,00	22.288.576,00	0,74
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.959.458.608,00	3.843.543.606,00	3.612.478.006,00	(231.085.000,00)	(6,01)
2	16	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	0,00	1.577.134.000,00	1.619.929.976,00	42.795.976,00	2,71
2	17		KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.758.500.000,00	4.428.880.700,00	4.073.328.220,00	(355.554.480,00)	(8,03)
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.500.000.000,00	3.933.987.000,00	3.732.918.920,00	(201.088.080,00)	(5,11)
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	27.500.000,00	24.418.900,00	24.418.900,00	0,00	0,00
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	80.000.000,00	28.690.000,00	0,00	(28.690.000,00)	(100,00)
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	51.000.000,00	46.739.400,00	0,00	(46.739.400,00)	(100,00)
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000,00	90.029.100,00	38.291.100,00	(51.738.000,00)	(57,47)
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	305.016.300,00	277.697.300,00	(27.319.000,00)	(8,96)
2	18		PENANAMAN MODAL	6.192.113.350,00	5.163.829.000,00	4.682.215.865,00	(481.613.135,00)	(9,33)
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.122.169.800,00	2.937.389.200,00	3.016.175.065,00	78.785.865,00	2,68
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.208.652.900,00	1.543.227.900,00	982.828.900,00	(560.399.000,00)	(38,31)
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	609.290.650,00	323.089.900,00	323.089.900,00	0,00	0,00
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	189.000.000,00	326.122.000,00	326.122.000,00	0,00	0,00
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	63.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00

2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		6.403.528.590,00	7.783.091.100,00	7.649.186.548,00	(133.924.552,00)	(1,72)
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		4.704.811.701,00	4.917.119.800,00	5.078.560.248,00	161.440.448,00	3,28
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN		1.090.512.400,00	1.040.511.700,00	990.511.700,00	(50.000.000,00)	(4,61)
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEOLAHRAGAAN		608.204.489,00	1.825.459.600,00	1.580.094.600,00	(245.365.000,00)	(13,44)
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20		STATISTIK		75.000.000,00	285.558.000,00	143.449.000,00	(142.109.000,00)	(49,77)
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		75.000.000,00	285.558.000,00	143.449.000,00	(142.109.000,00)	(49,77)
2	21		PERSANDIAN		258.000.000,00	560.867.250,00	405.029.250,00	(155.838.000,00)	(27,79)
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		258.000.000,00	560.867.250,00	405.029.250,00	(155.838.000,00)	(27,79)
2	22		KEBUDAYAAN		1.617.081.400,00	2.755.744.000,00	2.657.785.000,00	(97.958.000,00)	(3,55)
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		1.110.722.400,00	1.905.744.000,00	1.905.410.000,00	(334.000,00)	(0,02)
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		384.910.000,00	850.000.000,00	752.376.000,00	(97.624.000,00)	(11,49)
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		121.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23		PERPUSTAKAAN		24.637.104.120,00	4.038.195.004,00	4.351.502.082,00	313.307.078,00	7,76
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		260.604.120,00	2.551.419.700,00	2.568.657.778,00	17.238.078,00	0,68
2	23		KABUPATEN KOTA						
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		24.378.500.000,00	1.486.775.304,00	1.782.844.304,00	296.069.000,00	19,91
2	24		KEARIFAN		3.447.800.000,00	71.502.000,00	24.143.000,00	(47.359.000,00)	(66,23)
2	24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24		KABUPATEN KOTA						
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		1.723.900.000,00	71.502.000,00	24.143.000,00	(47.359.000,00)	(66,23)
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		1.723.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		29.018.847.160,00	31.818.495.130,00	37.224.048.197,00	5.405.563.067,00	16,99
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN		5.213.532.550,00	6.008.485.380,00	6.549.939.060,00	541.453.680,00	9,01
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.178.215.550,00	3.015.858.160,00	3.091.893.740,00	76.034.580,00	2,52
3	25		KABUPATEN KOTA						
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		154.588.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.121.576.100,00	89.948.000,00	190.708.000,00	100.760.000,00	112,02
3	25	4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		279.384.900,00	2.224.661.120,00	2.418.479.120,00	193.818.000,00	6,71

3	25	5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	479.767.200,00	323.634.900,00	392.024.900,00	68.400.000,00	21,14
3	26		PARIWISATA	5.443.187.600,00	2.197.168.100,00	2.903.927.724,00	706.759.624,00	32,17
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.865.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KABUPATEN/KOTA					
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.043.113.400,00	876.290.900,00	1.810.248.624,00	933.957.724,00	106,58
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.534.178.200,00	1.320.877.200,00	1.093.679.100,00	(227.198.100,00)	(17,20)
3	27		PERTANIAN	14.667.650.000,00	20.634.059.950,00	24.379.587.913,00	3.745.527.963,00	18,15
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.728.104.000,00	11.688.203.350,00	13.375.208.313,00	1.688.004.963,00	14,44
			KABUPATEN/KOTA					
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.048.662.000,00	2.167.791.200,00	4.471.847.700,00	2.304.056.500,00	106,29
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.917.000.000,00	4.618.012.400,00	4.780.754.400,00	162.742.000,00	3,52
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	0,00	388.000.000,00	379.000.000,00	(9.000.000,00)	(2,32)
			MASYARAKAT VETERINER					
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	471.264.000,00	171.703.000,00	88.140.500,00	(83.562.500,00)	(48,67)
			PERTANIAN					
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.502.820.000,00	1.600.350.000,00	1.283.637.000,00	(316.713.000,00)	(19,79)
3	28		KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30		PERDAGANGAN	2.104.467.030,00	1.338.063.700,00	1.699.079.500,00	361.015.800,00	26,96
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	80.569.000,00	0,00	(80.569.000,00)	(100,00)
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	610.731.100,00	1.010.040.100,00	399.309.000,00	65,38
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	650.000.000,00	292.746.600,00	444.102.000,00	151.355.400,00	51,70
			BARANG PENTING					
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.274.467.030,00	158.774.500,00	158.774.500,00	0,00	0,00
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100.000.000,00	142.761.000,00	88.162.900,00	(56.598.100,00)	(39,65)
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	80.000.000,00	52.681.500,00	0,00	(52.681.500,00)	(100,00)
3	31		PERINDUSTRIAN	1.590.000.000,00	1.640.708.000,00	1.691.514.000,00	50.806.000,00	3,10
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.500.000.000,00	1.640.708.000,00	1.691.514.000,00	50.806.000,00	3,10
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32		TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4			UNSUR PENDUKUNG	96.684.048.008,39	109.748.384.810,00	103.345.213.393,00	(6.403.171.417,00)	(5,83)
4	1		SEKRETARIAT DAERAH	54.856.361.007,39	68.124.753.980,00	59.888.970.338,00	(8.535.783.642,00)	(12,53)
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.636.737.028,00	51.758.078.680,00	48.869.308.638,00	(2.888.772.042,00)	(5,58)
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.479.748.584,39	14.017.697.000,00	8.574.413.900,00	(5.443.483.100,00)	(38,83)
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.904.230.000,00	2.348.778.300,00	2.145.248.800,00	(203.528.500,00)	(8,67)
4	1	4	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	7.835.645.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2		SEKRETARIAT DPRD	31.827.685.002,00	41.623.630.830,00	43.756.243.055,00	2.132.612.225,00	5,12
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.330.379.002,00	20.795.142.330,00	21.711.484.555,00	916.342.225,00	4,41
4	2	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	1.131.157.000,00	20.828.488.500,00	22.044.758.500,00	1.216.270.000,00	5,84
4	2	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.366.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG	46.317.817.010,00	231.493.914.472,00	232.894.208.020,06	1.400.294.548,06	0,60
5	1		PERENCANAAN	3.545.307.000,00	7.368.080.920,00	6.762.510.578,00	(603.576.342,00)	(8,19)
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.637.331.520,00	3.482.092.678,00	(155.238.842,00)	(4,27)
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.728.204.000,00	2.105.913.400,00	1.821.404.400,00	(284.509.000,00)	(13,51)
5	1	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	975.383.000,00	1.622.842.000,00	1.459.013.500,00	(163.828.500,00)	(10,10)
5	1	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	230.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	611.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2		KEUANGAN	23.494.756.436,00	215.294.867.590,00	217.271.140.942,06	1.976.473.352,06	0,92
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.943.109.336,00	22.593.937.968,00	23.271.100.971,00	677.163.011,00	3,00
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.982.083.400,00	189.488.531.038,00	190.876.170.371,06	1.389.639.341,06	0,73
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.176.171.400,00	1.615.713.400,00	1.469.417.400,00	(146.296.000,00)	(9,05)
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.393.392.300,00	1.598.485.200,00	1.654.452.300,00	55.967.000,00	3,50
5	3		KEPEGAWAIAN	6.976.088.612,00	5.170.317.162,00	5.837.977.921,00	467.660.769,00	9,05
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.200.814.638,00	2.500.040.880,00	2.549.254.639,00	49.213.759,00	1,97

5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.777.273.982,00	2.670.276.282,00	3.088.723.282,00	418.447.000,00	15,67
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.017.328.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.008.664.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.008.664.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.262.336.700,00	3.662.842.800,00	3.222.579.579,00	(440.263.221,00)	(12,02)
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.183.018.200,00	2.558.524.300,00	2.333.857.079,00	(224.667.221,00)	(8,79)
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.099.318.500,00	1.104.318.500,00	888.922.500,00	(215.396.000,00)	(19,50)
5	6		PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7		PENGLOLAAN PERBATASAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSLIR PENGAWASAN	12.314.720.034,00	7.268.735.504,00	8.269.234.905,76	1.000.499.401,76	13,78
6	1		INSPEKTORAT DAERAH	12.314.720.034,00	7.268.735.504,00	8.269.234.905,76	1.000.499.401,76	13,78
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.830.079.534,00	5.747.655.004,00	6.602.945.405,76	855.260.401,76	14,88
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.165.581.500,00	1.090.575.500,00	1.354.504.000,00	263.928.500,00	24,20
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	319.079.000,00	430.475.000,00	311.785.500,00	(118.689.500,00)	(27,57)
7			UNSLIR KEWILAYAHAN	40.001.761.302,12	16.092.848.218,00	15.279.392.318,00	(813.455.900,00)	(5,05)
7	1		KECAMATAN	40.001.761.302,12	16.092.848.218,00	15.279.392.318,00	(813.455.900,00)	(5,05)
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.917.214.022,12	10.818.919.978,00	10.097.273.878,00	(721.646.100,00)	(6,67)
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.061.201.982,00	534.315.800,00	520.090.800,00	(14.225.000,00)	(2,66)
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.717.462.618,00	3.014.991.540,00	2.961.716.540,00	(53.275.000,00)	(1,77)
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.605.508.514,00	610.959.300,00	614.214.300,00	3.225.000,00	0,53
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.889.799.652,00	351.653.700,00	354.288.700,00	2.635.000,00	0,75
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.810.574.514,00	761.977.900,00	731.808.100,00	(30.169.800,00)	(3,96)
8			UNSLIR PEMERINTAHAN UMUM	1.732.973.478,00	4.140.484.006,00	4.937.111.352,00	796.627.346,00	19,24
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.732.973.478,00	4.140.484.006,00	4.937.111.352,00	796.627.346,00	19,24
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.244.601.778,00	1.267.837.234,00	1.288.927.325,00	21.090.091,00	1,66

8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	122.967.000,00	77.384.800,00	100.000.000,00	22.605.200,00	29,21
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	73.244.000,00	645.506.872,00	1.140.185.672,00	194.679.000,00	20,59
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	78.522.000,00	915.047.000,00	865.047.000,00	(50.000.000,00)	(5,46)
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	65.355.500,00	123.396.400,00	0,00	(123.396.400,00)	(100,00)
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	148.283.200,00	811.301.700,00	1.542.951.155,00	731.649.455,00	90,18
9			UNSUR KEKHUSUSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARAF KOORDINASI									
NO	KEPADA	PARAF							
1	SETDAKAB								
2	ASISTEN I								
3	ASISTEN II								
4	BUPD								
5	Kepala								
6	Inspektur								
7	B. Pembangunan								
8									
9									
10	KABAG HUKUM								

BUPATI LAMPUNG BARAT

BAROBI MABSUS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2021

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Rancangan Perubahan APBD (Rp)
1-01.2-22.0-00.01				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	302.130.433.732,24
1-01.2-22.0-00.01	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	299.472.647.732,24
1-01.2-22.0-00.01	1	01		PENDIDIKAN	0,00	0,00	299.472.647.732,24
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	211.658.238.900,24
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	107.381.998,00
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	107.381.998,00
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	210.781.076.504,24
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	210.773.037.904,24
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	1.578.900,00
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	2.849.900,00
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SKPD	0,00	0,00	1.359.900,00
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	2.249.900,00
1-01.2-22.0-00.01	1	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	15.000.000,00

Kode				Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Rancangan Perubahan APBD (Rp)
8-01.0-00.0-00.47	8	01	04	2.01			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	865.047.000,00
8-01.0-00.0-00.47	8	01	04	2.01			
				02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	35.970.000,00
8-01.0-00.0-00.47	8	01	04	2.01			
				03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	629.077.000,00
8-01.0-00.0-00.47	8	01	06				
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	0,00	1.542.951.155,00
8-01.0-00.0-00.47	8	01	06	2.01			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0,00	0,00	1.542.951.155,00
8-01.0-00.0-00.47	8	01	06	2.01			
				04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0,00	0,00	1.459.648.955,00
8-01.0-00.0-00.47	8	01	06	2.01			
				05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0,00	0,00	83.302.200,00

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	Bpk.D
5	Revisi
6	Wakil
7	B. Pembangunan
8	
9	
10	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
						TENAGA	STAF	
	I	II	III	IV	V		STRUKTURAL	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d		1						1
Golongan IV/c		24				4	2	30
Golongan IV/b		6	44	1		366	5	422
Golongan IV/a		1	79	25		395	10	510
JUMLAH GOLONGAN IV	0	32	123	26	0	765	17	963
Golongan III/d			38	169		540	30	777
Golongan III/c			8	226		328	58	620
Golongan III/b				102		297	138	537
Golongan III/a				18		142	380	540
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	46	515	0	1307	606	2474
Golongan II/d						114	54	168
Golongan II/c						26	136	162
Golongan II/b						39	67	106
Golongan II/a						10	26	36
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	189	283	472
Golongan I/d							2	2
Golongan I/c							5	5
Golongan I/b							4	4
Golongan I/a							-	-
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	32	169	541	0	2261	917	3920

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	R. P. W. D.	
5	Bappeda	
6	Inspektoral	
7	RS - Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK.	U R A I A N	2020 (Audited)			2019 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	7
1	2	4	5	6		
5.1.1.	PENDAPATAN					
5.1.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
5.1.1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	10.984.037.486,00	11.794.800.883,00	107,38	13.376.645.930,00	
5.1.1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.754.838.247,00	3.018.063.766,00	63,47	2.227.953.290,00	
5.1.1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.757.968.413,47	4.809.979.700,29	101,09	4.431.384.496,46	
5.1.1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	45.274.459.533,27	41.596.621.104,74	91,88	45.231.452.948,10	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	65.771.303.679,74	61.219.465.454,03	93,08	65.267.416.664,56	
5.1.1.2.	PENDAPATAN TRANSFER					
5.1.1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan					
5.1.1.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	12.342.476.850,00	10.219.127.884,00	82,80	10.686.260.139,00	
5.1.1.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.595.592.391,00	7.911.070.030,00	104,15	5.519.994.728,00	
5.1.1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	500.613.336.000,00	497.587.574.000,00	99,40	543.777.950.000,00	
5.1.1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus Fisik	103.819.679.000,00	100.001.107.517,00	96,32	138.886.939.793,00	
5.1.1.2.1.5.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	91.299.557.424,00	91.524.597.271,00	100,25	92.921.772.600,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 14)	715.670.643.665,00	707.243.876.702,00	98,82	791.712.917.260,00	
5.1.1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA					
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Alokasi Desa/Pekon	126.016.068.000,00	126.016.068.000,00	100,00	127.188.855.977,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya (17 s.d. 19)	126.016.068.000,00	126.016.068.000,00	100,00	127.188.855.977,00	

KODE REK.	U R A I A N	2020 (Audited)			2019 (Audited)	
		Anggaran 4	Realisasi 5	%	Realisasi 7	
1	2					
5.1.1.2.3. 5.1.1.2.3.1.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (22 s.d. 23) Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+24)	58.752.140.223,05 0,00 58.752.140.223,05 900.438.851.888,05	62.140.456.604,28 0,00 62.140.456.604,26 895.400.401.306,26	105,77 0,00 105,77 99,44	70.674.988.287,03 0,00 70.674.988.287,03 989.576.761.524,03	
5.1.1.3. 5.1.1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan - LRA	20.362.528.000,00 0,00 0,00 34.010.670.000,00 0,00 0,00	20.362.528.000,00 0,00 0,00 34.029.360.000,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 100,05 0,00 0,00	36.091.614.000,00 0,00 0,00 31.371.840.000,00 0,00 0,00	
5.1.1.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 s.d. 32)	54.373.198.000,00 1.020.583.353.567,79	54.391.388.000,00 1.011.011.754.760,29	100,03 99,06	67.463.454.000,00 1.122.307.632.188,59	
5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.1.1. 5.1.2.1.2. 5.1.2.1.3. 5.1.2.1.4. 5.1.2.1.5. 5.1.2.1.6.	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (37 s.d. 42)	465.319.922.931,51 213.180.086.459,85 0,00 0,00 15.419.867.900,00 250.000.000,00 694.169.877.291,36	424.325.254.536,00 198.758.705.807,84 0,00 0,00 13.493.595.000,00 250.000.000,00 636.827.545.343,84	91,19 93,24 0,00 0,00 87,51 100,00 91,74	415.872.475.122,00 287.300.408.320,10 0,00 0,00 16.180.765.800,00 250.000.000,00 719.603.649.242,10	
5.1.2.2. 5.1.2.2. 5.1.2.2. 5.1.2.2. 5.1.2.2. 5.1.2.2.	BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal (45 s.d. 49)	240.000.000,00 42.042.628.760,00 43.061.204.039,00 50.153.609.263,60 10.025.957.500,00 145.523.399.562,60	239.570.000,00 40.402.844.896,00 42.336.328.293,00 48.597.784.030,00 9.292.979.401,00 140.869.506.620,00	99,82 96,10 98,32 96,90 92,69 96,80	311.618.750,00 29.832.747.660,46 69.298.809.234,53 111.868.780.540,00 9.566.377.369,00 220.878.333.553,99	

KODE REK.	U R A I A N	2020 (Audited)				2019 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	%	6	Realisasi	
		4	5			7	
1	2						
5.1.2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA						
5.1.2.3.	Belanja Tidak Terduga	27.052.669.238,55	22.108.088.093,00	81,72			844.780.000,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga (52)	27.052.669.238,55	22.108.088.093,00	81,72			844.780.000,00
	JUMLAH BELANJA (43 + 50 + 53)	866.745.946.092,51	799.805.140.056,84	92,28			941.326.762.796,09
	TRANSFER						
5.1.2.4.	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA						
5.1.2.4.	Bagi Hasil Pajak	1.098.403.800,00	1.052.279.400,00	95,80			1.060.608.000,00
5.1.2.4.	Bagi Hasil Retribusi	475.483.900,00	265.067.000,00	55,75			171.208.000,00
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (57 s.d. 58)	1.573.887.700,00	1.317.346.400,00	83,70			1.231.816.000,00
5.1.2.5.	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN						
5.1.2.5.	Bantuan Keuangan kepada Provinsi	0,00	0,00	0,00			292.859.280,00
5.1.2.5.	Bantuan Keuangan kepada Desa	182.844.242.000,00	182.844.242.000,00	100,00			182.495.879.000,00
5.1.2.5.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	671.274.683,00	671.274.683,00	100,00			671.274.683,00
	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (61 s.d. 63)	183.515.516.683,00	183.515.516.683,00	100,00			183.460.012.963,00
	JUMLAH TRANSFER (59 + 64)	185.089.404.383,00	184.832.883.083,00	99,86			184.891.828.963,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (54 + 65)	1.051.835.350.475,51	984.638.003.139,84	93,61			1.126.018.591.759,09
5.1.3	SURPLUS / (DEFISIT) (34 - 66)	-31.251.996.907,72	26.373.751.620,45	-84,39			-3.710.959.570,50
5.1.4.	PENBIAYAAN						
5.1.4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
5.1.4.1.1.	Penggunaan SilPA tahun sebelumnya	35.251.996.907,72	35.251.996.907,72	100,00			40.512.956.478,22
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00			0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00			0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00			0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00			0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00			0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s.d. 81)	35.251.996.907,72	35.251.996.907,72	100,00			40.512.956.478,22

OPD KABAG HUKUM

KODE REK.	U R A I A N	2020 (Audited)			2019 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
		4	5	6	7	
1	2					
5.1.4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
5.1.4.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00		0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00		1.550.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00		0,00
	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (84 s.d. 95)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00		1.550.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO (82 - 96)	31.251.996.907,72	31.251.996.907,72	100,00		38.962.956.478,22
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (67 + 97)	0,00	57.625.748.528,17	0,00		35.251.996.907,72

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	RPKD
5	Bup. Desa
6	Wakil a-1
7	B. Pembangunan
8	
9	
10	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN XI :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT											
DAFTAR PINJAMAN DAERAH											
TAHUN ANGGARAN 2021											
No.	Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah	Daftar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ke (Rp)			Jumlah sisa pembayaran
								Pokok pinjaman daerah		Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Jumlah											
NIHIL											

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	BUPD
5	Bupati
6	Inspektur
7	B. Kemasyarakatan
8	
9	
10	KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS